

PANDUAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Seri IV

Pendampingan Kasus yang Berdimensi Perdata



**PANDUAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA
DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT**

Seri IV

Pendampingan Kasus yang Berdimensi Perdata

Tim Penyusun:

Sri Wiyanti Eddyono
Fitria Villa Sahara
Nunik Sri Harini
Annisa Ayuningtyas
Erma Nuzulia Syifa
Jennifer

Layout & Cover
Tim LGS UGM

Ukuran: 21 x 29,7 cm

Cetakan Pertama, Januari 2024

ISBN: xxxxxx

Penerbit:

Yayasan Pemberdayaan PEKKA
Jalan Pangkalan Jati V No.3, RT.11/RW.5, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13620

bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Kata Pengantar

Yayasan PEKKA telah menjalankan Program Pemberdayaan Hukum Perempuan sejak tahun 2005 untuk mengatasi ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dan komunitas marginal. Program ini melatih perempuan kepala keluarga yang juga sebagai penyintas kekerasan sebagai Paralegal Komunitas untuk mendorong pemberdayaan hukum dalam masyarakat. Paralegal Komunitas ini memainkan peran penting dalam menjangkau perempuan dan anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di desa-desa terpencil dan menghadapi kemiskinan, untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka dan mengakses keadilan. Paralegal Pekka juga membantu menyelesaikan kasus-kasus yang berdampak pada perempuan dan komunitas marginal.

Menyadari pentingnya peran mereka, Yayasan PEKKA bersama Pusat Kajian *Law, Gender and Society* (LGS) Fakultas Hukum UGM, menyusun “Panduan dan Standar Prosedur Operasional Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat” yang terdiri dari 6 (enam) seri yang berfungsi sebagai instrumen refleksi, pemantauan dan evaluasi terhadap kapasitas peran dan praktik Paralegal Komunitas Pekka agar selaras dengan ketentuan peraturan perundangan serta prinsip dan nilai keadilan gender serta akuntabilitas publik. Panduan & SOP Seri IV ini memberikan penjelasan seputar peran Paralegal Komunitas Pekka dalam pendampingan kasus berdimensi perdata yaitu seputar perkawinan dan perceraian secara lebih rinci mulai dari tahapan penerimaan informasi atau aduan, analisis informasi, pendampingan, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

- Fitria Villa Sahara (Co-Director PEKKA)

Salah satu isu strategis dan program prioritas Pusat Kajian *Law, Gender and Society* (LGS) Fakultas Hukum UGM adalah menyokong pemberdayaan hukum masyarakat dalam rangka penguatan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat marjinal. LGS menyadari bahwa perempuan kepala keluarga merupakan salah satu kelompok marjinal yang membutuhkan pemberdayaan hukum. Pemberdayaan hukum perempuan marjinal bertujuan untuk penyadaran hak-hak, baik sebagai warga negara maupun sebagai perempuan. Pengetahuan terhadap hak akan berpengaruh terhadap jalan yang dipilih ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Perempuan yang sadar akan haknya akan lebih mampu mencari strategi dalam mengakses keadilan. Pertimbangan inilah yang mendorong LGS mendedikasikan waktunya, bekerja sama dengan PEKKA dalam rangka memperkuat Paralegal Komunitas Pekka melalui penyusunan “Panduan dan Standar Prosedur Operasional Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat”.

Panduan dan Standar Prosedur Operasional ini terdiri dari 6 (enam) seri dengan titik fokus yang berkesinambungan. “Seri IV: Pendampingan Kasus yang Berdimensi Perdata” disusun dengan mengacu pada “Seri I: Peran, Prinsip, dan Kode Etik” dan “Seri II: Alur Pendampingan”, serta mempertimbangkan praktik-praktik pendampingan kasus yang telah berjalan dan kebutuhan mendatang. Bagian ini menegaskan peran Paralegal Komunitas Pekka sebagai pendamping perempuan yang berhadapan dengan hukum pada kasus-kasus perdata, sekaligus memberikan acuan prosedur dalam pendampingan tersebut.

- Sri Wiyanti Eddyono (Ketua LGS)

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Kamus Kecil	5
Peran Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Kasus yang Berdimensi Perdata	7
Sekilas tentang Itsbat Nikah	8
Sekilas tentang Gugat Cerai	8
Sekilas tentang Gugatan Hak Pasca Cerai	10
Sekilas tentang Pembatalan Perkawinan	11
Syarat-syarat untuk Mengajukan Permohonan/Gugatan ke Pengadilan	12
Tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata	13
Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	16
Alur Pendampingan Masyarakat oleh Paralegal Komunitas Pekka	17
A. Langkah-Langkah Penerimaan Informasi/Aduan	18
B. Langkah-Langkah Analisis Pengaduan/Informasi	22
C. Pendampingan	24
Persidangan Elektronik (e-Litigasi)	27
Panjar Biaya Perkara untuk Persidangan di Pengadilan dan Persidangan Elektronik	28
Sidang Keliling	29
D. Monitoring	30
E. Pelaporan	32
F. Evaluasi	34
Referensi	35